



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 115 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA KECAMATAN TAROGONG KALER TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kaler Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kaler Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN TAROGONG KALER TAHUN 2023.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

**BAB II****SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN****Pasal 2**

Renja Kecamatan Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

**Pasal 3**

- (1) Renja Kecamatan Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Renja Kecamatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2023.

**BAB III****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**N U R D I N Y A N A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT**

**TAHUN 2022 NOMOR 115**

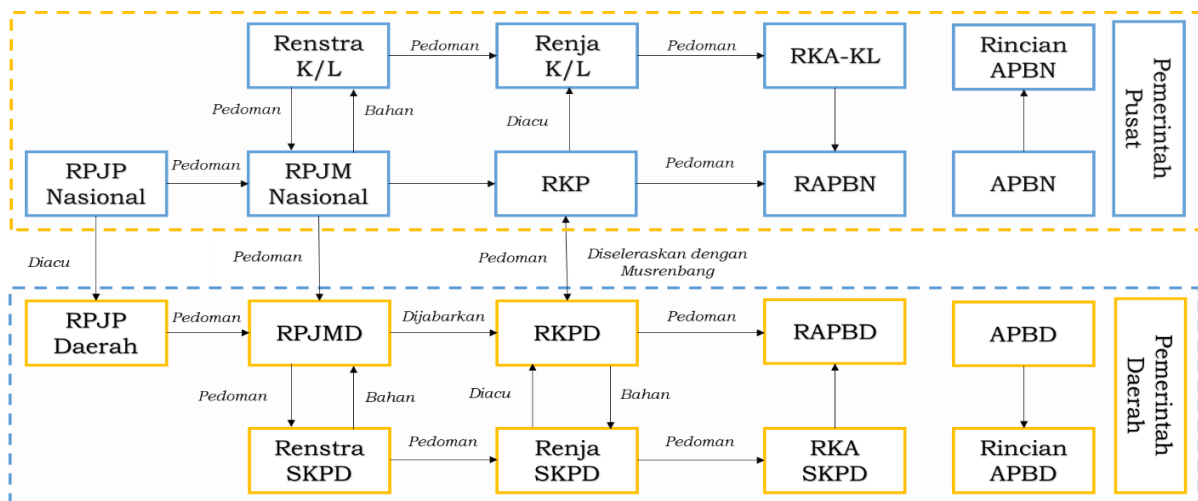




pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023.

**Gambar 1.1**

**Hubungan Antara Renja Terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Lain**



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Renja SKPD/Kecamatan Tarogong Kaler Tahun 2023 berpedoman pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah. Renja SKPD/Kecamatan Tarogong Kaler Tahun 2023 juga berdasarkan pada Renstra Perangkat Daerah, program pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya. bahwa Renja SKPD/Kecamatan Tarogong Kaler merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD, sehingga memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja program, dan kegiatan dalam RKPD harus benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan perangkat kerja daerah, Rencana kerja diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih bersifat spesifik (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Achievable*), sesuai atau relevan (*Relevant*), dan tepat waktu (*Time-bond*). Disamping itu, nilai keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat mencapai

dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral dan komprehensif. Renja SKPD/Kecamatan Tarogong Kaler Tahun 2023 juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Garut menghadapi tantangan dalam penanganan pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, penyebaran pandemi COVID-19 telah menjadi masalah kesehatan dunia, dan hingga saat ini masih terdapat tanda-tanda penyebarannya. Pandemi COVID-19 tahun 2021 sudah terkendali pada level yang rendah, diharapkan mulai bisa lepas dari tekanan pandemi COVID-19. Oleh sebab itu arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 difokuskan pada upaya promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi, rekonstruksi dampak pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial, dan penanggulangan pandemi COVID-19 secara komprehensif. Penyusunan RKPD Tahun 2023 memuat pula gambaran umum, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, yang diperkirakan akan mengalami transformasi menuju keseimbangan baru (*new normal*) pasca COVID-19.

Pandemi COVID-19 telah memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya mencegah lonjakan kasus di masa depan. Masa epidemi saat ini telah membawa perubahan besar pada semua aspek kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan teknologi. Epidemi bukan hanya ujian, tetapi juga peluang baru. Asumsi yang digunakan dalam pembangunan daerah tahun 2023 yaitu :

- a. Masyarakat diharapkan sudah dapat hidup berdampingan dengan COVID-19 seiring dengan adanya vaksin, serta terbentuknya *herd- immunity*.
- b. Transaksi digital menjadi preferensi masyarakat dalam bertransaksi jual beli.
- c. Pemanfaatan program relaksasi kredit berjalan optimal, serta upaya pemulihan ekonomi nasional sudah berjalan dengan baik, termasuk sudah kembali berjalannya proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
- d. Seluruh aktivitas masyarakat sudah berjalan normal namun tetap menerapkan protokol kesehatan pada semua lini (*new normal*).

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”. Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengemban tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan pelimpahan delegasi tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
8. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
9. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
10. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
11. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
12. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
13. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
14. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

Hasil pembangunan yang diinginkan tersebut akan tercapai dengan optimal apabila ada perencanaan yang terintegrasi dan bersinergi pada setiap lapis pelaku pembangunan. Sejalan dengan itu untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan setiap tahun nya maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 RKPD Tahun 2023, proses penyusunan Renja Kabupaten Garut Tahun 2023 dilakukan melalui beberapa tahapan dan di tentukan Tema Pembangunan Tahun 2023 yaitu “ **Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan daya saing daerah serta Penguatan Demokrasi untuk kesejahteraan Masyarakat**” yang di turunkan ke dalam Program dalam Rencana Kerja SKPD/Kecamatan Tarogong Kaler Tahun 2023 sebagai bahan dari perencanaan pembangunan Kabupaten Garut dan penjabaran tahun keempat dari rencana pembangunan jangka menengah,

disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD/Kecamatan dan sebagai bahan penyusunan RKPD/Renja Kabupaten Garut.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Tarogong Kaler tahun 2023.

## **1.2 Landasan Hukum**

- 1.2.1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)
- 1.2.2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19 ) dan/ataudalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485 )
- 1.2.3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenfaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19 ) dan/ataudalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485 )

- 1.2.4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400 )
- 1.2.5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 1.2.6 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 1.2.7 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 1.2.8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 1.2.9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- 1.2.10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 1.2.11 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 1.2.12 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- 1.2.13 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 1.2.14 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 1.2.15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



- 1.2.16 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 1.2.17 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
- 1.2.18 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
- 1.2.19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 1.2.20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 1.2.21 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
- 1.2.22 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
- 1.2.23 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);

- 1.2.24 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
- 1.2.25 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
- 1.2.26 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
- 1.2.27 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
- 1.2.28 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
- 1.2.29 Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor



27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);

1.2.30 Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tarogong Kaler tahun 2023 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Tarogong Kaler guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tarogong Kaler Tahun 2023 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Tarogong Kaler;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tarogong Kaler Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

## **BAB I Pendahuluan**

### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud

Memuat penjelasan tentang maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### 1.3.2 Tujuan

Memuat penjelasan tentang tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu;

#### 2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Tarogong Kaler sudah disahkan.

#### 2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Sub bab ini memuat kajian pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

#### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

#### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

### **BAB III Tujuan dan Sasaran.**

#### 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional;

Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

### 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
  - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

### **BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.**

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

### **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

### **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi

penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Tarogong Kaler. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tarogong Kaler ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Tarogong Kaler selama tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 serta perkiraan target anggaran Tahun 2023.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tarogong Kaler Tahun 2021 antara lain :

**1. Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

**1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a Penyusunan Renstra dan Renja perangkat Daerah
- b Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah

**2. Kegiatan Administrasi keuangan**

Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

**3 Kegiatan Administrasi Umum**

- a Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- b Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
- c Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/operasional
- d Penyediaan jasa kebersihan kantor
- e Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- f Penyediaan alat tulis kantor
- g Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- h Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- i Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
- j Penyediaan peralatan rumah tangga

- k Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
  - l Penyediaan makanan dan minuman
  - m Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  - n Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
  - o Pengadaan perlengkapan Gedung kantor
  - p Pengadaan meubeulair
  - q Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
  - r Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
  - s Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
- 4. Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
- a Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
  - b Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
  - c Pengadaan Pakaian khusus Hari-hari Tertentu

**2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

- 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - a Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
  - b Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 2 Penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan
- 3 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 

Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan Pihak swasta
- 4 Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perijinan

**3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

- 1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
  - a. Peningkatan partisipasi masyarakat dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
  - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan



c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

#### **4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan
- b Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

#### **5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

#### **6 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Desa  
Fasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tarogong Kaler 2020 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2020 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

#### **2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan**

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Tarogong Kaler dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 16 Kegiatan 28 sub kegiatan terdapat 7 ( tujuh ) Kegiatan (46,67%) yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ( 92,54% )
2. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ( 99,98 % )
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (92,26%)
4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (93,13%)

5. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan ( 98,54%)
6. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (99,98%)
7. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (99,98%)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**

No	Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.470.019.158	2.285.782.429	92,54
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.972.006.000	1.971.694.200	99,98
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.074.000	65.571.520	92,26
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.075.000	43.842.000	93,13
5	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	223.502.300	217.158.300	97,16
6	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	860.722.057	860.591.747	99,98
7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	793.685.657	793.555.347	99,98

- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Tarogong Kaler dalam pelaksanaan Renja 2021 dari 15 Kegiatan 28 sub kegiatan terdapat 8 (delapan ) Kegiatan (53,33%) yang target kinerja hasil/keluaran memenuhi target kinerja, antara lain :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
3. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
4. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
5. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
6. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM )
7. Kegiatan Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum
8. Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
9. Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**

No	Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.340.000	5.340.000	100,00
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	194.650.900	194.650.900	100,00
3	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	211.932.000	211.932.000	100,00
4	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3.640.000	3.640.000	100,00
5	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	280.584.000	280.584.000	100,00
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM	148.583.100	148.583.100	100,00

	)			
7	Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	123.934.000	123.934.000	100,00
8	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100.000.000	100.000.000	100,00
9	Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.174.000	12.174.000	100,00

3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada tahun anggaran 2021, tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2021 Perangkat Daerah Kecamatan Tarogong Kaler.

4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Adapun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

- a. Adanya kesalahan kode rekening pada jenis kegiatan, sehingga tidak dapat mencairkan anggaran sebagaimana yang telah direncanakan, contohnya seperti pada kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, ada anggaran yang tidak terserap karena salah kode rekening;
- b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/desa;
- c. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Tarogong Kaler adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Tarogong Kaler tahun

2020 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Tarogong Kaler pada umumnya.

b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Tarogong Kaler berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Tarogong Kaler .

6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :

a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.

b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

### 2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Renstra Perangkat Daerah merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Oleh karena itu Renstra Kecamatan Tarogong Kaler merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Tarogong Kaler selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut.





Adapun capaian Renstra Kecamatan Tarogong Kaler tahun lalu (tahun 2021) seperti terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Tarogong Kaler**  
**Kabupaten Garut Tahun 2021**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Tingkat	1.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Point	82	Triwulan 1				
						Triwulan 2		80,43		
						Triwulan 3				
						Triwulan 4		83,18		

Kecamatan					<b>Kondisi Akhir (F)</b>	<b>81,805</b>	<b>99,76</b>	
2 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Tingkat Kecamatan	2.1	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Nilai	7,2	Triwulan 1	7,2	7,59	105,4
					Triwulan 2			
					Triwulan 3			
					Triwulan 4			
					<b>Kondisi Akhir ( F )</b>		7,59	105,4
3 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	3.1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	100	Triwulan 1	100		
					Triwulan 2			
					Triwulan 3			
					Triwulan 4			
					<b>Kondisi Akhir ( F )</b>		90	90
4 Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan	4.1	Nilai/Predikat SAKIP	Predikat	B	Triwulan 1			
					Triwulan 2			
					Triwulan 3			
					Triwulan 4	<b>B</b>	B	100
					<b>Kondisi Akhir (F)</b>		B	100

### Keterangan

Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 4 ( empat ) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja Kecamatan Tarogong Kaler tahun 2021, tidak ada sasaran dan indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.
2. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir mencapai target 100% sebanyak 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan
3. Sasaran dan Indikator kinerja yang pada kondisi akhir melebihi target 100% ada 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan dimana dari target 100% pencapaiannya sampai 105,4%.
4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target sasaran dan indikator kinerja, adalah karena sasaran dan indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian sasaran dan indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah sasaran dan indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2021 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2019-2024 pada tahun ke 1 pelaksanaan Renstra Kecamatan Tarogong Kaler . Dengan tercapainya target capaian Renstra Perangkat Daerah 2020-2021 sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra Perangkat Daerah 2019-2024.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tarogong Kaler selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut ini :





**Tabel T-C.29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021**  
**Kabupaten Garut**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tarogong Kaler

Lembar : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7 01		<b>Kecamatan</b>								
7 01 40 01		<b>Kecamatan Tarogong Kaler</b>								
<b>7 01 01</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	<b>100%</b>	<b>100%</b>					
<b>7 01 01</b>	2,01	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan					
7 01 01	2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	1 dokumen	1 dokumen					
<b>7 01 01</b>	2,02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan					
7 01 01	2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun					

7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan						
7	01	01	2,06		<b>Administrasi Perangkat Daerah Umum</b>	Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan						
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	14 item	14 item						
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	43 item	43 item						
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	10 item	10 item						
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	2 jenis	2 jenis						
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	78 exemplar	78 exemplar						
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	<b>1 tahun</b>	<b>1 tahun</b>						
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	<b>20 OH</b>	<b>20 OH</b>						
7	01	01	2,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 laporan	1 laporan						

7	01	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	1 unit						
7	01	01	2,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 laporan	1 laporan						
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	12 bulan	12 bulan						
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	17 unit	17 unit						
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	1 paket	1 paket						
7	01	01	2,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 laporan	1 laporan						
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	9 unit	9 unit						
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9 unit	9 unit						
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	100%						
7	01	02	2,01	02	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 laporam	1 laporam						

7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	6 kegiatan	6 kegiatan						
7	01	02	2,02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	1 laporan	1 laporan						
7	01	02	2,02	01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	2 kegiatan	2 kegiatan						
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan								
7	01	03	2,01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	1 laporan	1 laporan						
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	1 dokumen	1 dokumen						
7	01	03	2,02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan</b>								
7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Kelurahan	1 dokumen	1 dokumen						
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	3 paket	3 paket						

					Prasarana Kelurahan													
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	4 kegiatan	4 kegiatan										
7	01	03			<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah laporan Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<b>1 laporan</b>	<b>1 laporan</b>										
7	01	03	02		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah RT/RW dan lembaga Kemasyarakatan yang memiliki kinerja baik	<b>65 OH</b>	<b>65 OH</b>										
					<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM )	<b>1 laporan</b>	<b>1 laporan</b>										
7	01	24	82	011	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah sosialisasi pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	65 OH	65 OH										
7	01	24	82	019	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah kegiatan penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan	1 kegiatan	1 kegiatan										
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Prosentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%										
7	01	04	2,01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah laporan penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	1 laporan	1 laporan										
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Jumlah mopnitoring ketentraman dan ketertiban	2 kegiatan	2 kegiatan										

					Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	ke Desa/Kelurahan								
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah cabang/golongan yang di ikuti	8 cab/gol	8 cab/gol						
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100%	100%						
7	01	05	2,01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 laporan	1 laporan						
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan						
7	01	05			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%						
7	01	05	2,01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah laporan pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 laporan	1 laporan						
7	01	05	2,01		Fasilitasi Penerapan dan Penegakan PeraturanPerundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan razia	65 OH	65 OH						

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Tarogong Kaler sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C.30  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun 2022	Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			80	82	85	87	90	79,82	81,805		
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			7	7,2	7,5	7,7	8	-	7,59		
3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan			100	100	100	100	100	-	90		
4	Predikat SAKIP Kecamatan			CC	B	BB	BB	A	-	B		



### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.**

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut pada tahun 2021, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting, penurunan Angka Kematian IBU;
2. Peningkatan Pelayanan Publik, moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender, kekerasan pada perempuan dan pemenuhan hak anak;
3. Peningkatan Kapasitas SDM
4. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial;
5. Penanganan kebencanaan baik alam maupun non alam
6. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya;

Dalam rangka menyelesaikan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tarogong Kaler ditentukan langkah-langkah penting yaitu sebagai berikut :

#### **1) Pemanfaatan**

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

#### **2) Optimalisasi**

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial*

*Resposipility ( CSR )*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

### **3) Pelayanan Prima.**

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

### **4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.**

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,**

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Tarogong Kaler serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wilayah Kecamatan Tarogong Kaler (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kaler berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2023 yang diusulkan Kecamatan Tarogong Kaler sebesar Rp. 8.078.383.352-.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Tarogong Kaler diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2023 Kecamatan Tarogong Kaler mengusulkan 6 (enam) Program dengan 20 ( dua puluh ) kegiatan dan 66 ( enam puluh enam ) Sub Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting Program dan kegiatan pada Kecamatan Tarogong Kaler mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel T-C.31  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023  
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Tarogong Kaler

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>									
<b>7</b>	<b>01</b>				<b>8.078.383.352</b>	<b>KECAMATAN</b>					<b>8.078.383.352</b>				
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kecamatan Tarogong Kaler	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	<b>4.394.147.441</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kecamatan Tarogong Kaler	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	<b>4.394.147.441</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	2,01			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>20.235.090</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>20.235.090</b>
7	01	01	2,01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	1 Dokumen	2.235.090	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	1 Dokumen	2.235.090
7	01	01	2,01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000

7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.000.000	

7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan	1 Dokumen	3.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan	1 Dokumen	3.000.000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	2,02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>2.792.438.607</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>2.792.438.607</b>
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2.782.438.607	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2.782.438.607
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	5.000.000
7	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 laporan	5.000.000

7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		102.500.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		102.500.000	
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.500.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.500.000	
7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100.000.000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	2,05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>72.559.320</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>72.559.320</b>	
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	45 paket	33.810.400	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	45 paket	33.810.400	
7	01	01	2,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	18.748.920	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	18.748.920	
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	15.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	15.000.000	

7	01	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	60 orang	5.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	60 orang	5.000.000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	2,06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>12.014.064</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	<b>12.014.064</b>	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Sesuai Kebutuhan	2 paket	12.014.064	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Sesuai Kebutuhan	2 paket	12.014.064	
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	2 paket	105.793.050	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	2 paket	105.793.050	
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	2 paket	7.535.704	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	2 paket	7.535.704	
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	2 paket	22.116.820	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	2 paket	22.116.820	



7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	24 Dokumen	13.412.520	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	24 Dokumen	13.412.520
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	1364 orang	30.600.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	1364 orang	30.600.000
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Penyediaan Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600 OH	33.600.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Penyediaan Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600 OH	33.600.000
7	01	01	2,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>3.515.249.300</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>3.515.249.300</b>
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	4 unit	140.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	4 unit	140.000.000
7	01	01	2,07	03	Pengadaan Alat Besar	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah unit Alat Besar yang disediakan	2 unit	50.000.000	Pengadaan Alat Besar	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah unit Alat Besar yang disediakan	2 unit	50.000.000
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	4 unit	30.000.000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	4 unit	30.000.000

7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 unit	100.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 unit	100.000.000	
7	01	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tarogong Kaler Kelurahan Pananjung	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 unit	1.600.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tarogong Kaler Kelurahan Pananjung	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 unit	1.600.000.000	
7	01	01	2,07	10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	150.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	150.000.000	
7	01	01	2,07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	100.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	100.000.000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	2,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>58.405.886</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>58.405.886</b>	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	12 bulan	32.630.136	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	12 bulan	32.630.136	
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	3 item	12.496.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	3 item	12.496.000	

7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	12 Bulan	50.226.330	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	12 Bulan	50.226.330	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	2,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>153.949.800</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	<b>153.949.800</b>	
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	10 unit	29.5353.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	10 unit	29.5353.000	
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8 unit	54.414.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8 unit	54.414.800	
7	01	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah mebel yang dipelihara	5 unit	50.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah mebel yang dipelihara	5 unit	50.000.000	
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	20.000.000	

7	01	01	2,13		<b>Penataan Organisasi</b>					<b>Penataan Organisasi</b>				
7	01	01	2,13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 laporan	62.000.000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 laporan	62.000.000
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	<b>514.727.400</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	<b>514.727.400</b>
7	01	02	2,01	02	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	<b>92.227.200</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	<b>92.227.200</b>
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	8 Kegiatan	92.227.200	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	8 Kegiatan	92.227.200

7	01	02	2,02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	1 Laporan	<b>212.500.200</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	1 Laporan	<b>212.500.200</b>	
7	01	02	2,02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	1 laporan	212.500.200	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	1 laporan	212.500.200	
7	01	02	2,03		<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>		Jumlah Laporan Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	1 laporan	<b>50.000.000</b>	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>		Jumlah Laporan Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	1 laporan	<b>50.000.000</b>	
7	01	02	2,03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan Pihak Swasta	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah lokasi pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	1 lokasi	50.000.000	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan Pihak Swasta	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah lokasi pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	1 lokasi	50.000.000	
7	01	02	2,04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>				<b>160.000.000</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>				<b>160.000.000</b>	
7	01	02	2,04	02	<b>Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan</b>	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	1 kegiatan	<b>160.000.000</b>	<b>Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan</b>	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	1 kegiatan	<b>160.000.000</b>	

7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	<b>315.148.200</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	<b>315.148.200</b>	
7	01	03	2.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	12 Desa	3.960.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	12 Desa	3.960.000	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan		Jumlah kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	1 kegiatan	15.000.000	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan		Jumlah kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	1 kegiatan	15.000.000	
7	01	03	2,02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	<b>10.795.400</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	<b>10.795.400</b>	
7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Pananjung	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Kelurahan	1 kegiatan	10.795.400	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Pananjung	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Kelurahan	1 kegiatan	10.795.400	
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pananjung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	2 unit	985.094.231	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pananjung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	2 unit	985.094.231	

7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pananjung	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	1 pokmas /ormas	117.105.780	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pananjung	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	1 pokmas /ormas	117.105.780	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	2,03		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>				<b>285.392.800</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>				<b>285.392.800</b>	
7	01	03	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Pananjung	Jumlah laporan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1 laporan	285.392.800	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Pananjung	Jumlah laporan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1 laporan	285.392.800	
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	<b>197.111.800</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	<b>197.111.800</b>	
7	01	04	2,01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	<b>197.111.800</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	<b>197.111.800</b>	
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	12 Kali	147.111.800	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	12 Kali	147.111.800	
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	1 Kegiatan	50.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	1 Kegiatan	50.000.000	

7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	125.000.000	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	125.000.000	
7	01	05	2,01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	259.640.700	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	259.640.700	
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Tarogong Kaler	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	60 orang	20.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Tarogong Kaler	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	60 orang	20.000.000	
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Tarogong Kaler	jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	40 orang	5.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Tarogong Kaler	jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	40 orang	5.000.000	
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam	12 Kali	100.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam	12 Kali	100.000.000	



7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	<b>130.048.500</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	<b>130.048.500</b>	
7	01	06	2,01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	<b>57.999.090</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Laporan	<b>57.999.090</b>	
7	01	06	2,01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 dokumen	5.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 dokumen	5.000.000	
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 dokumen	5.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 dokumen	5.000.000	
7	01	06	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	10.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	10.000.000	

7	01	06	2,01	04	Fasilitasi Penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah dokumen dalam rangka Fasilitasi Penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan	1 dokumen	22.465.300	Fasilitasi Penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah dokumen dalam rangka Fasilitasi Penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan	1 dokumen	22.465.300
7	01	06	2,01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah dokumen dalam rangka Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 dokumen	10.516.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah dokumen dalam rangka Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 dokumen	10.516.000
7	01	06	2,01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah dokumen dalam rangka Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 dokumen	5.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah dokumen dalam rangka Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 dokumen	5.000.000
7	01	06	2,01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	5.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	5.000.000
7	01	06	2,01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	5.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	5.000.000

7	01	06	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Tarogong Kaler dan Kelurahan Pananjung	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2 dokumen	32.067.200	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Tarogong Kaler dan Kelurahan Pananjung	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2 dokumen	32.067.200
7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Dokumen RPTK	1 Dokumen	20.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Dokumen RPTK	1 Dokumen	20.000.000
7	01	06	2,01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 dokumen	5.000.000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 dokumen	5.000.000
7	01	06	2,01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	1 laporan	5.000.000	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Kecamatan Tarogong Kaler	Jumlah Laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	1 laporan	5.000.000
<b>TOTAL</b>									8.078.383.352					8.078.383.352

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Tarogong Kaler melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Tarogong Kaler mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel T-C.32.**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023**  
**Kabupaten Garut**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tarogong Kaler

NO	PRORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN KEGIATAN	LOKASI (Desa/Kelurahan)	VOLUME	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	Tercapainya derajata kesehatan masyarakat yang optimal	Pembangunan Gedung posyandu	Pembangunan Gedung posyandu	Meningkatkan indeks pembangunan bidang kesehatan	Pananjung, Sirnajaya	5 Unit		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	Tercapainya derajata kesehatan masyarakat yang optimal	Pengadaan Peralatan Posyandu	Pengadaan Peralatan Posyandu	Meningkatkan indeks pembangunan bidang kesehatan	Sirnajaya, Panjiwangi, Pasawahan, Pananjung, Jati, Cimanganten	6 Unit		Dinas Kesehatan
3	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah	Pembinaan LPM, RT, RW	Pembinaan LPM, RT, RW	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional	Mekarwangi	2 kegiatan		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	Bantuan sarana usaha peternakan (sapi potong sapi perah, domba garut dan unggas)	Bantuan sarana usaha peternakan (sapi potong sapi perah, domba garut dan unggas)	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pananjung, Pasawahan	13 Kelompok		Dinas Perikanan dan Peternakan
5	Peningkatan investasi dan pendapatan daerah	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Pembangunan Desa wisata Desa Jati, Desa Mekarjaya, Pasawahan	Pembangunan Desa wisata	Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal	Desa Jati, Mekarjaya, Pasawahan, Sukajadi	3 Paket		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

6	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	Pembangunan Rutilahu	Pembangunan Rutilahu	Meningkatnya kualitas perumahan	Sirnajaya, Langensari, Panjiwangi, Sukawangi, Rancabango, Paawahan	20 Unit		Dinas Perumahan dan Pemukiman
7	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah	Sarana dan prasarana kearsipan dan pembinaan kearsipan	Sarana dan prasarana kearsipan dan pembinaan kearsipan	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional		1 Unit		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
8	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	Jaringan irigasi Usaha Tani	Jaringan irigasi Usaha Tani	Meningkatnya daya beli masyarakat	Sukajadi,	1 Paket		Dinas Pertanian
9	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan	Pembangunan sumur air tanah untuk air baku	Pembangunan sumur air tanah untuk air baku	Meningkatnya pemenuhan akses layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Kel. Pananjung, Tajungkamuning, Mekarwangi, Sirnajaya, Langensari	8 titik		Dinas Perumahan dan Pemukiman
10	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	Penyediaan mesin pengolahan sampah	Penyediaan mesin pengolahan sampah	Meningkatnya daya beli masyarakat		1 Paket		Dinas Lingkungan Hidup
11	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	Penangkaran Benih padi	Penangkaran Benih padi	Meningkatnya daya beli masyarakat		1 Unit		Dinas Pertanian
12	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	Perbaikan Jalan Kabupaten	Perbaikan Jalan Kabupaten	Meningkatnya daya beli masyarakat	Jati, Kel. Pananjung, Langensari, Mekarwangi, Panjiwangi, Sukawangi, Sirnajaya,, Tanjungkamuning, Mekarjaya,	1 Paket		Dinas PUPR

13	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	Jalan usaha tani	Jalan usaha tani	Meningkatnya daya beli masyarakat	Rancabango Jati, Panjiwangi	300 m2		Dinas Pertanian
14	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	Pembangunan Lumbung Pangan	Pembangunan Lumbung Pangan	Meningkatnya daya beli masyarakat	Tanjungkamuning	1 Paket		Dinas Ketahanan Pangan
15	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	Meningkatnya kemajuan pembangunan desa	Pengadaan sarana/prsarana olahraga	Pengadaan sarana/prsarana olahraga	Meningkatkan kualitas olahraga yang unggul dan berprestasi	Pananjung, Langensari, Jati, Sukajadi	1 Unit		Dinas Pemuda dan Olah Raga
16	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Pembangunan RKB-SD	Pembangunan RKB-SD	Meningkatkan indeks pembangunan bidang pendidikan	Sirnajaya, Langensari	1 Paket		Dinas Pendidikan
17	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal	Jaringan usaha tani	Jaringan usaha tani	Meningkatnya daya beli masyarakat	Jati,	281 m3		Dinas Pertanian
18	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir	Pembangunan jaringan irigrasi permukaan (Di kewenangan Kabupaten dibawah 1.000 Ha)	Pembangunan jaringan irigrasi permukaan (Di kewenangan Kabupaten dibawah 1.000 Ha)	Meningkatnya pengelolaan irigasi	Sukajadi	600 m		Dinas PUPR

19	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan	Pembangunan tempat Pengolahan Sampah 3R sekolah permukiman untuk permukiman kumuh	Pembangunan tempat Pengolahan Sampah 3R sekolah permukiman untuk permukiman kumuh	Meningkatnya kualitas kawasan pemukiman	Jati	1 Paket		Dinas Perumahan dan Permukiman
20	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir	Peningkatan drainase permukaan untuk cegah kumuh	Peningkatan drainase permukaan untuk cegah kumuh	Meningkatnya pengelolaan irigasi	Jati, Langensari , Mekarwangi, Sukajadi, Sirnajaya, Rancabango, Cimanganten	300 m2		Dinas Perumahan dan Permukiman
21	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	Meningkatnya kemajuan pembangunan desa	Pembangunan gedung olahraga	Pembangunan gedung olahraga	Meningkatkan kualitas olahraga yang unggul dan berprestasi	Jati, Langensari, Sukajadi	1 Unit (20 m x 10 m)		Dinas Pemuda dan Olah Raga
22	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan	Perluasan Sistem penyediaan air minum (SPAM) Jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Perluasan Sistem penyediaan air minum (SPAM) Jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Meningkatnya pemenuhan akses layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Sirnajaya			Dinas Perumahan dan Permukiman
23	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan	Pengadaan Kendaraan angkutan sampah roda 3 dan drum truk	Pengadaan Kendaraan angkutan sampah roda 3	Meningkatnya kualitas kawasan pemukiman	Kel. Pananjung, Jati, Sirnajaya, Langensari	13 unit		Dinas Perumahan dan Permukiman
24	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	peningkatan sarana keagamaan untuk hunian kawasan strategis	peningkatan sarana keagamaan untuk hunian kawasan strategis	Mewujudkan masyarakat bertaqwa	Pananjung,	1 Paket		Dinas Perumahan dan Permukiman
25	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman	Pembangunan penerangan Jalan umum Permukiman untuk hunian kawasan strategis	Pembangunan penerangan Jalan umum Permukiman untuk hunian kawasan strategis	Meningkatnya kualitas kawasan pemukiman	Pananjung, Mekarwangi, Langensari	25 Unit		Dinas Perhubungan

26	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata	Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir	Pembangunan tembok penahan tanah untuk cegah kumuh	Pembangunan tembok penahan tanah untuk cegah kumuh	Meningkatnya kualitas kawasan pemukiman	Tanjungkamuning, Sukawangi, Panjiwangi, Sukajadi, Sirnajaya, Pananjung, Jati	75 m		Dinas Perumahan dan Permukiman
27	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Pemagaran Halaman sekolah - SD	Pemagaran Halaman sekolah - SD	Meningkatkan indeks pembangunan bidang pendidikan	Cimanganten	1 Paket		Dinas Pendidikan
28	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	Meningkatnya kemajuan pembangunan desa	Pembangunan Gedung olahraga Desa	Pembangunan Gedung olahraga Desa	Meningkatkan kualitas olahraga yang unggul dan berprestasi	Panjiwangi	200 m2		Dinas Pemuda dan Olah Raga
29	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	Meningkatnya kemajuan pembangunan desa	Rehabilitasi/ Peningkatan lapang volly	Rehabilitasi/ Peningkatan lapang volly	Meningkatkan kualitas olahraga yang unggul dan berprestasi	Sukajadi	1 Unit		Dinas Pemuda dan Olah Raga
30	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Pembangunan RKB PAUD	Pembangunan RKB PAUD	Meningkatkan indeks pembangunan bidang pendidikan	Panjiwangi, Sukajadi	2 Paket	100.000.000	Dinas Pendidikan
31	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Pembangunan RKB SMP	Pembangunan RKB SMP	Meningkatkan indeks pembangunan bidang pendidikan	Langensari	1 Paket		Dinas Pendidikan



32	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah	Insentif Guru Ngaji	Insentif Guru Ngaji	Mewujudkan masyarakat bertaqwa	Mekarwangi, Panjiwangi, Sukajadi, Jati	35 Orang		Sekretariat Daerah
33	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, KB, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta pemuda dan olah raga	Meningkatnya kemajuan pembangunan desa	Bantuan Modal Usaha	Bantuan Modal Usaha	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Mekarwangi	1 Paket		Dinas Pemuda dan Olah Raga

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta untuk penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten Garut dalam menyusun rencana kerja tahun 2023 senantiasa memperhatikan Lima Arahuan Utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia, dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi, dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi ekonomi, dengan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumberdaya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pada Lima Arahuan Pembangunan diatas, serta dengan mengkaji kondisi sosial masyarakat Kabupaten Garut, maka Prioritas Pembangunan Daerah untuk tahun 2022, diarahkan pada:

1. Perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha dalam rangka penurunan angka kemiskinan;

2. Peningkatan kualitas infrastruktur secara merata dalam rangka pengembangan wilayah;
3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dalam rangka reformasi sosial;
4. Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya dalam rangka recovery ekonomi;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
6. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur; serta
7. Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Atas dasar keselarasan agenda pembangunan dan isu strategis di atas, maka Tema Pembangunan untuk Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat.**

Sejatinya keberhasilan pembangunan Kabupaten Garut merupakan keberhasilan kolektif dari peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Garut, tentu saja dengan didukung oleh bantuan dari Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi **Terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini harus dilakukan secara berkualitas dan lebih produktif sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan program, kegiatan maupun sub kegiatan harus bersifat yang menyentuh masyarakat secara langsung;
2. Peningkatan investasi di daerah, dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat dan mencari sumber-sumber pembiayaan lain dengan pola kemitraan;
3. Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat ekonomi, infrastruktur pedesaan, khususnya untuk mengatasi ketertinggalan wilayah pedesaan agar perekonomian masyarakat bisa berkembang; serta
4. Membangun komitmen seluruh stekholder baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah disepakati bersama.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Tarogong Kaler mempunyai tujuan :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Yang Profesioanal dan Amanah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Sedangkan yang menjadi indikator tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Tarogong Kaler Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan .
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Tarogong Kaler Tahun 2023 adalah :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Tarogong Kaler Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan**  
**Tarogong Kaler Tahun 2023**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	87
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	77
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	100%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	BB

### 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Tarogong Kaler merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Tarogong Kaler sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat

mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Tarogong Kaler diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Tarogong Kaler merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian SDG's

Sustainable Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara di dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Tarogong Kaler diimplementasikan untuk mencapai target – target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat

disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Tarogong Kaler. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2023 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 2 tahun 2018 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Tarogong Kaler diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Tarogong Kaler sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan tas dan bendera, dibidang makanan seperti burayot, ranginang, dodol, kerupuk, kerupuk kulit, tahu, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti curug ciharus, curug cimandaracun, terutama wisata situ dan candi cangkuang.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Tarogong Kaler melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

c. Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Tarogong Kaler Tahun 2023 adalah 6 (enam) Program dengan 20 ( dua puluh ) kegiatan dan 66 ( enam puluh enam ) Sub Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Tarogong Kaler sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Tarogong Kaler dan mencakup semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. 8.078.383.352,-.

Adapun Program Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan



kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Tarogong Kaler pada Tahun 2023 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.3.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.3.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.5.2 Pengadaan Mebel

1.5.3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.6.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - 1.7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
  - Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    - 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
      - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
        - 2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
    - 2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
      - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
        - 2.2.1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
  - Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    - 3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
      - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
        - 3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- 4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
  - Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
    - 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
      - Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
        - 4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
        - 4.1.2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
    - 4.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

4.2.1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

5.1.1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

5.1.2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

5.1.3 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

6.1.1 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

6.1.2 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

6.1.3 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

6.1.4 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut ini :

**Tabel T-C. 33**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Kabupaten Garut**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															
7	01	<b>KECAMATAN</b>								<b>8.078.383.352</b>		<b>7.340.700.808</b>					
7	01	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>								<b>4,394,147,441</b>		<b>4,249,755,386</b>				
7	01	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>								<b>20,235,090</b>		<b>22,258,000</b>			
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai/Predikat SAKIP	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	85 Point	2,235,090	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2,458,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai/Predikat SAKIP	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	85 Point	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	3,300,000

7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai/Predikat SAKIP	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	85 Point	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	3,300,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Nilai/Predikat SAKIP	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	85 Point	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	3,300,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Nilai/Predikat SAKIP	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	85 Point	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	3,300,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai/Predikat SAKIP	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	85 Point	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	3,300,000

7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai/Predikat SAKIP	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokume	85 Point	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	3,300,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							<b>2,792,438,607</b>				<b>3,071,682,000</b>	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai/Predikat SAKIP	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	38 Orang/Bu	85 Point	2,782,438,607	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	3,060,682,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai/Predikat SAKIP	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	85 Point	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	5,500,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai/Predikat SAKIP	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	85 Point	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	5,500,000

<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>							<b>102,500,000</b>					<b>112,750,000</b>	
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai/Predi- kat SAKIP	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	85 Point	2,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerinta- han Daerah Kabupaten /Kota	100 %	2,750,000
7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai/Predi- kat SAKIP	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	85 Point	100,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Penunjang Urusa Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	110,000,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							<b>72,559,320</b>					<b>56,154,120</b>	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Nilai/Predi- kat SAKIP	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	45 Paket	85 Point	33,810,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	16,905,200
7	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaa an Sistem Informasi Kepegawaia n	Nilai/Predi- kat SAKIP	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	85 Point	18,748,920	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Kota	100 %	18,748,920
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Nilai/Predi- kat SAKIP	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	3 Orang	85 Point	15,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah Kabupate n/Kota	100 %	15,000,000

7	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai/Prediksi SAKIP	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	60 Orang	85 Point	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	5,500,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>225,112,158</b>				<b>245,679,373</b>		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Nilai/Prediksi SAKIP	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	2 Paket	85 Point	12,014,064	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	13,215,470
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai/Prediksi SAKIP	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	3 Paket	85 Point	105,793,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	116,372,355
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Nilai/Prediksi SAKIP	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	2 Paket	85 Point	7,535,704	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	8,289,274
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Nilai/Prediksi SAKIP	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	2 Paket	85 Point	22,116,820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	24,328,502



7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Nilai/Predikat SAKIP	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	24 Dokumen	85 Point	13,412,520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	14,753,772
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai/Predikat SAKIP	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	85 Point	30,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	33,720,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai/Predikat SAKIP	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	85 Point	33,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	35,000,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>870,000,000</b>					<b>435,000,000</b>
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Disediakan	Nilai/Predikat SAKIP	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	85 Point	140,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	70,000,000
7	01	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Alat Besaryang Disediakan	Nilai/Predikat SAKIP	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	85 Point	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	0

7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Nilai/Prediksi SAKIP	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	85 Point	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	15,000,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Nilai/Prediksi SAKIP	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	85 Point	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100,000,000
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nilai/Prediksi SAKIP	Tarogong Kaler, Kelurahan Pananjung	100 %	3 Unit	85 Point	1.600,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	150,000,000
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nilai/Prediksi SAKIP	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	85 Point	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	50,000,000
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nilai/Prediksi SAKIP	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	85 Point	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	50,000,000

<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>95,352,466</b>					<b>104,887,113</b>	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Nilai/Predikat SAKIP	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	85 Point	32,630,136	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	35,893,150
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai/Predikat SAKIP	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	85 Point	12,496,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	13,745,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Nilai/Predikat SAKIP	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	85 Point	50,226,330	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	55,248,963
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>153,949,800</b>				<b>137,344,780</b>		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Nilai/Predikat SAKIP	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	10 Unit	85 Point	29,535,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	32,488,500
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	Nilai/Predikat SAKIP	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	8 Unit	85 Point	54,414,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	59,856,280



7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai/Predikat SAKIP	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	1 Kegiatan	85 Point	212,500,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	233,859,120
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>		<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>							<b>50,000,000</b>				<b>50,000,000</b>	
7	01	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Nilai/Predikat SAKIP	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	1 Lokasi	85 Point	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	50,000,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>							<b>160,000,000</b>				<b>176,000,000</b>	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Nilai/Predikat SAKIP	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	1 Kegiatan	85 Point	160,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	176,000,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>							<b>315,148,200</b>				<b>346,663,020</b>	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>							<b>18,960,000</b>				<b>20,856,000</b>	

7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Prosentase Program Pemberdayaan MasyarakatDesa dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	12 Lembaga	100 %	3,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	4,356,000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase Program Pemberdayaan MasyarakatDesa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	16,500,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>							<b>10,795,400</b>				<b>11,874,940</b>		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Prosentase Program Pemberdayaan MasyarakatDesa dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Pananjung	100 %	15 Lembaga	100 %	10,795,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	11,874,940
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Prosentase Program Pemberdayaan MasyarakatDesa dan Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kelurahan Pananjung	100%	2 unit	100%	985.094.231	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Pemberdayaan MasyarakatDesa dan Kelurahan	100 %	1.083.603.654
7	01	03	2.02	02	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Prosentase Program Pemberdayaan MasyarakatDesa dan Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kelurahan Pananjung	100%	1 Pokmas/or mas	100%	117.105.780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Pemberdayaan MasyarakatDesa dan Kelurahan	100 %	128.816.358

7	01	03	2.03		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>							<b>285,392,800</b>						<b>313,932,080</b>	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	285,392,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	313,932,080	
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>							<b>197,111,800</b>						<b>200,000,000</b>	
7	01	04	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>							<b>197,111,800</b>						<b>200,000,000</b>	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Prosentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Nilai Sine rgitas Kine rja Keca mat an	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	85 Point	147,111,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	150,000,000	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Prosentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Nilai Sine rgitas Kine rja Keca mat an	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	85 Point	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	50,000,000	
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>							<b>125,000,000</b>						<b>127,500,000</b>	
7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>							<b>125,000,000</b>							<b>127,500,000</b>

7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Prosentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Nilai Sine rgitas Kinerja Kcamatan	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	60 Orang	85 Point	20,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	22,000,000
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Prosentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Nilai Sine rgitas Kinerja Kcamatan	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	40 Orang	85 Point	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	5,500,000



7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Prosentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Nilai Sine rgitas Kine rja Keca mat an	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	85 Point	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100,000,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>06</b>			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>							<b>130,048,500</b>					<b>143,053,350</b>	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>06</b>	<b>2.01</b>		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>							<b>130,048,500</b>						<b>143,053,350</b>
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Prosentase Desa/Kelurahan yang berkinerja Baik	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	85 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	5,500,000
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Prosentase Desa/Kelurahan yang berkinerja Baik	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	85 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	5,500,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Prosentase Desa/Kelurahan yang berkinerja Baik	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	85 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	11,000,000

7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase Desa/Kelurahan yang berkinerja Baik	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	85 %	22,465,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	24,711,830
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Prosentase Desa/Kelurahan yang berkinerja Baik	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	85 %	10,516,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	11,567,600
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Prosentase Desa/Kelurahan yang berkinerja Baik	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	85 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	5,500,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerahdengan Pembangunan Desa	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Prosentase Desa/Kelurahan yang berkinerja Baik	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	85 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	5,500,000
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Desa/Kelurahan yang berkinerja Baik	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	85 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	5,500,000

7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Prosentase Desa/Kelurahan yang berkinerja Baik	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	85 %	32,067,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	35,273,920
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Prosentase Desa/Kelurahan yang berkinerja Baik	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	8 Dokumen	85 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	22,000,000
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan MasyarakatDesa	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Prosentase Desa/Kelurahan yang berkinerja Baik	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	85 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	5,500,000
7	01	06	2.01	17	Koordinasi PendampinganDesa di Wilayahnya	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Prosentase Desa/Kelurahan yang berkinerja Baik	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	85 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	5,500,000
												<b>8.078.383.352</b>			<b>7.340.700.808</b>		



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kaler Tahun 2023 yaitu dengan melaksanakan adalah 6 (enam) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2023 di Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut sebesar Rp. **8.078.383.352,-** ( Delapan milyar tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah ), yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- Capaian Program : Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 4.394.147.441,-
- Keluaran : 1. Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.  
2. Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
3. Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
4. Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
5. Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
6. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
7. Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tarogong Kaler

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Dokumen

Masukan : Jumlah Dana Rp. 20.235.090,-

Keluaran : 1. Jumlah dokumen Perencanaan  
2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tarogong Kaler

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 2.792.438.607,-

Keluaran : 1. Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN  
2. Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tarogong Kaler

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Capaian Program : Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 72.559.320,-

Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  
2. Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tarogong Kaler

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 225.112.158,-

Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan  
2. Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan  
3. Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan  
4. Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan  
5. Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa  
6. Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan  
7. Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tarogong Kaler

#### 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 2.170.000.000,-

Keluaran : 1. Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan  
2. Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tarogong Kaler

#### 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 95.352.466,-

Keluaran : 1. Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan  
2. Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan

3. Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tarogong Kaler

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian Program : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 153.949.800,-

Keluaran : 1. Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan  
2. Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan.

Hasil : Nilai SAKIP Kecamatan dengan target kinerja Predikat SAKIP (B)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tarogong Kaler

**2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

Capaian Program : Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 514.727.400,-

Keluaran : 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  
2. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tarogong Kaler



## 2.1 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 92.227.200,-

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tarogong Kaler

## 2.2 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Capaian Program : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 212.500.200,-

Keluaran : Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan.

Hasil : Nilai SKM dengan Target Indeks Kepuasan Masyarakat 82 (Baik)

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tarogong Kaler

## 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Capaian Program : Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 1.417.348.211,-

Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tarogong Kaler

### 3.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 18.960.000,-
- Keluaran : Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa
- Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dengan target kinerja 90%
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tarogong Kaler

### 3.2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- Capaian Program : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 1.112.995.411,-
- Keluaran : 1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan  
2. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangunan  
3. Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 7,7
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tarogong Kaler

### 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Capaian Program : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum kecamatan Dengan Target 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 197.111.800,-
- Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 70
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tarogong Kaler

#### 4.2 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Capaian Program : Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 197.111.800,-
- Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri  
2. Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 7,7

#### 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Dengan Target Kinerja 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 125.000.000,-
- Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 7,7
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tarogong Kaler

#### 5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Capaian Program : Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Dengan Target Kinerja 1 Laporan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 259.640.700,-
- Keluaran : 1. Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan  
2. Jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional  
3. Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 7,7

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tarogong Kaler

## **6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Capaian Program : Persentase Desa Berkinerja Baik Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 130.048.500,-

Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 7,7

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tarogong Kaler

### **6.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Capaian Program : Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dengan Target Kinerja 1 Laporan

Masukan : Jumlah Dana Rp. 130.048.500,-

Keluaran : 1. Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  
2. Jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan  
3. Jumlah Dokumen RPTK  
4. Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan target kinerja 7,7

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Tarogong Kaler

Total Jumlah Anggaran Sebesar Rp. **8.078.383.352,-** (Delapan Milyar Tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah )

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah yang di imlementasikan ke dalam tujuan dan sasaran Kecamatan Tarogong Kaler . Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan, Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan dan Predikat SAKIP Kecamatan.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2020. Maka perlu di lakukan strategi perencanaan yang efektif dan berorientasi hasil.

Penyusunan Renja Kecamatan Tarogong Kaler mengacu pada RKPD Tahun 2023 yang merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam hal ini menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS, serta rancangan APBD Tahun 2023.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Renja kecamatan Tarogong Kaler menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan atau triwulanan kepada Bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Tarogong Kaler melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**